

## BAB I

### PENDAHULUAN

Apartheid merupakan suatu praktek diskriminasi rasial yang tumbuh dan mengakar di belahan selatan benua Afrika, tepatnya di Negara Afrika Selatan. Masyarakat dunia menyoroti pemberlakuan sistem politik apartheid di Afrika Selatan karena bertentangan dengan Declration of Human Right. Dalam perkembangan masyarakat modern, proses integrasi masyarakat lebih cenderung mengarah kepada kebebasan dan hak seseorang maupun komunitas diakui keberadaannya dan dijunjung tinggi.

Pada satu sisi, disaat masyarakat dunia mulai menghilangkan batasan-batasan dan memerangi praktek diskriminasi rasial serta mengakui adanya persamaan hak. Hal tersebut juga menandai permulaan suatu pembaharuan dari usaha memperkuat dan menerapkan secara lebih dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia yang pokok, yang telah dibangun dengan landasan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (HAM) sejak tahun 1948.<sup>1</sup> Namun pada sisi yang lain sistem politik, apartheid yang sangat rasial dan bertentangan dengan persamaan hak masih terus diberlakukan di Afrika Selatan. Akibatnya dua sisi tersebut saling bersinggungan dan bertemu pada satu titik yang berakhir dengan dihapusnya sistem politik apartheid di Afrika Selatan.

---

<sup>1</sup> D. H. ... (1993). *Alai Juni 1993: Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia*. Kemisi

Dengan berakhirnya politik apartheid di Afrika Selatan yang dimotori oleh Nelson Mandela tentunya terjadi perubahan yang besar dalam segala aspek di negara tersebut. Kebijakan-kebijakan yang dulunya sangat diskriminatif juga mulai dihapus sehingga masyarakat mayoritas kulit hitam dapat berpartisipasi dalam berbagai bidang. Perubahan politik tentunya disertai dengan perubahan ekonomi karena keduanya saling berkaitan dalam pembangunan suatu negara.

Dari sekian banyak tulisan yang ada, kiranya masih terlalu sedikit atau bahkan belum ada yang menyoroti masalah perkembangan ekonomi Afrika Selatan. Maka pada kesempatan ini penulis akan mengangkat fenomena mengenai perkembangan ekonomi setelah berakhirnya apartheid. Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengambil judul penelitian: **“Perkembangan Ekonomi Afrika Selatan Pasca Apartheid (Studi Kasus: Pemerintahan Nelson Mandela 1994-1999)”**.

#### **A. Tujuan Penelitian**

Disamping sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian ini juga mempunyai beberapa tujuan antara lain :

1. Memberikan gambaran secara objektif fenomena yang terjadi di Afrika Selatan akibat diterapkannya sistem politik apartheid beserta perjuangan warga kulit hitam dalam memperjuangkan penghapusan diskriminasi rasial agar memperoleh persamaan hak dalam segala bidang.

2. Menguraikan sangat berpengaruhnya perubahan politik setelah berakhirnya apartheid terhadap perkembangan ekonomi Afrika Selatan.
3. Penelitian ini juga dimaksudkan sebagai manifestasi dari penerapan teori-teori yang telah didaaptkan selama menempuh pendidikan.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Afrika Selatan merupakan suatu negara yang mempunyai sejarah panjang dalam pembentukan bangsanya. Sebagaimana yang terjadi di negara-negara Asia, Afrika dan terutama Afrika Selatan juga merupakan sebuah negara bekas jajahan kaum imperialis. Sepanjang sejarah kolonialisme, bangsa Afrika Selatan merasakan kegetiran hidup dan mengalami pergolakan-pergolakan dalam mewujudkan identitas dan kemandirian bangsanya.

Selama 342 tahun Afrika Selatan tenggelam dalam sistem politik apartheid, dimana harkat manusia ditimbang atau dinilai berdasarkan warna kulit. Afrika Selatan dikuasai oleh dominasi minoritas kulit putih yang menerapkan suatu sistem yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan HAM.

*Politik apartheid merupakan campuran antara praktek-praktek kolonial, superioritas rasial kulit putih, teologi kalvinis dan filantropi paternalis, dan pada intinya mengajarkan bahwa setiap ras mempunyai panggilan tertentu, dan harus memberikan sumbangan budaya kepada dunia, oleh sebab itu ras-ras harus dipisahkan satu sama lain, agar dapat hidup dan berkembang sesuai dengan kepribadian masing-masing. Kontak antar ras yang dapat membahayakan budaya ras harus dibatasi. Segregasi dan perkembangan terpisah itu tak hanya berlaku untuk golongan-golongan rasial yang penting, tetapi juga untuk kelompok-kelompok etnis yang lebih kecil.<sup>2</sup> (Dennis Worrell)*

<sup>2</sup> Dennis Worrell, *White Man's Burden: A History of South Africa*, 1992, hal. 74

Sistem apartheid tumbuh di Afrika Selatan sejak kedatangan pemukiman Belanda yang dipimpin Jan Van Riebeeck tahun 1652. Semula sistem itu bertujuan untuk melindungi kebudayaan dan cara hidup para pendatang.<sup>3</sup> Namun lama kelamaan kebijakan tersebut menjadi alat untuk menekan kaum mayoritas kulit hitam. Banyak pemimpin apartheid di Afrika Selatan yang berusaha mengangkat prinsip-prinsip pemisahan ras antara kaum kulit hitam, kulit berwarna, dan golongan Asia dari kulit putih. Gagasan ini sudah ada sejak lahirnya Uni Afrika Selatan tahun 1910 di bawah Persemakmuran Inggris.<sup>4</sup>

Tidak diresmikannya politik apartheid secara konstitusional oleh pemerintah Afrika Selatan meskipun sudah mengakar akibat dipraktekkan selama puluhan tahun, membuat para penguasa minoritas kulit putih merasa khawatir dengan kebangkitan nasionalisme kulit hitam. Maka pemerintah minoritas kulit putih di Afrika Selatan menjadikan apartheid sebagai kebijakan resmi pemerintah. Apartheid menjadi politik resmi Afrika Selatan sejak tahun 1948 setelah Partai Nasional memegang kekuasaan atas pemerintah.<sup>5</sup> Setelah pemerintah Afrika Selatan memproklamkan apartheid menjadi sistem politik resmi dan dilindungi undang-undang, maka keadaan warga kulit hitam secara langsung menjadi warga negara kelas dua di negerinya sendiri.

Dibawah rezim apartheid, kelompok masyarakat kulit putih yang merupakan kelompok minoritas, pada satu pihak memberikan kontribusi yang sangat dominan dalam struktur perekonomian Afrika Selatan. Dibandingkan masyarakat kulit hitam

---

<sup>3</sup> *Merdeka Apartheid Afrika*, Tempo, 30 April 1994, hal. 39

<sup>4</sup> *50 Tahun Kemerdekaan Indonesia*, Jilid I, PT Cipta Adi Pustaka, Jakarta, 1988, hal. 145

yang merupakan kelompok mayoritas di lain pihak memiliki kontribusi yang sangat minimal. Hal ini dapat terjadi karena sejumlah kebijakan ekonomi yang bersifat sangat diskriminatif. Pada satu sisi, kebijakan ekonomi yang bersifat diskriminatif tersebut sangat menguntungkan kepentingan kelompok minoritas masyarakat kulit putih. Sebaliknya, pada sisi lain kepentingan kelompok mayoritas masyarakat kulit hitam bahkan sama sekali diabaikan dan ditenggelamkan, dengan serangkaian pembatasan terhadap kebebasan mereka untuk beraktivitas baik dalam perpolitikan nasional dan lokal maupun perekonomian nasional.<sup>6</sup>

Sistem apartheid menyebabkan distribusi kepemilikan tanah pertanian dan perkebunan di Afrika Selatan sangat timpang antara kelompok masyarakat kulit putih dengan kelompok masyarakat lainnya terutama kelompok masyarakat kulit hitam. Minoritas kulit putih menguasai 86% tanah di Afrika Selatan, sedangkan masyarakat mayoritas kulit hitam hanya diberikan 14% tanah yang tidak subur. Akibatnya, masyarakat kulit hitam menjadi masyarakat nomor dua di negerinya sendiri. Hal itu diperkuat dengan diberlakukannya UU pada tahun 1913, pemerintah apartheid memberlakukan Native Land act. Undang-undang ini melarang kelompok mayoritas masyarakat kulit hitam untuk membeli tanah di luar kawasan yang disediakan. UU tersebut kemudian disusul beberapa undang-undang lain yang juga sangat diskriminatif seperti Urban Areas Act dan Group Areas Act. Ketiga undang-undang

---

<sup>6</sup> Syamsumar Dam, *Afrika Selatan Pasca Apartheid, Peluang Kerjasama Samudra Hindia dan Kepentingan Indonesia*, LIPI, Jakarta, 1999, hal. 44

tersebut merupakan pilar utama sistem apartheid dan sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial ekonomi Afrika Selatan.

Otoritas lokal kulit hitam memiliki tanggung jawab yang sama dengan otoritas kulit putih, tetapi sedikit sekali otoritas lokal kulit hitam yang dapat berjalan secara ekonomis. Hal ini disebabkan tiga hal, pertama adalah kurangnya bisnis dan industri yang cukup berarti dalam wilayah otoritas masyarakat kulit hitam. Kedua adalah pendapatan perkapita masyarakat kulit hitam yang rendah walaupun secara keseluruhan pendapatan per kapita Afrika Selatan termasuk tinggi. Ketiga adalah akses yang sangat terbatas terhadap sumber-sumber pendapatan seperti pajak bangunan dan keuntungan jasa perdagangan.<sup>7</sup>

Sejak pertengahan dasawarsa 1980-an, pemerintah apartheid Afrika Selatan melancarkan deregulasi dan liberalisasi pasar dalam kebijakan pertaniannya. Berawal dari deregulasi sektor finansial pada akhir dasawarsa 1970-an, deregulasi dan liberalisasi sektor pertanian dimulai untuk meningkatkan kinerja dan akses para petani dalam sektor pemasaran dan finansial. Deregulasi dan liberalisasi sektor pertanian ini mendorong upaya penghapusan atau pengawasan gerakan buruh di Afrika Selatan pada pertengahan dasawarsa 1980-an serta deregulasi pada sektor ekonomi mikro yang menyebabkan peningkatan aktivitas pada sektor informal.

Secara nasional, pendapatan perkapita Afrika Selatan pada tahun 1990 mencapai 2.530 dolar AS. Pendapatan perkapita sebesar itu termasuk sangat

---

<sup>7</sup> Deon T Brand, "Equity in South Africa: Political and economic reform under the government of

menakjubkan di lingkungan negara-negara berkembang. Akan tetapi, angka tersebut merupakan pendapatan per kapita sebagian kecil masyarakat kulit putih, sedangkan masyarakat mayoritas kulit hitam terperangkap dalam kemiskinan struktural yang berkepanjangan. Dimana, Pendapatan per kapita masyarakat minoritas kulit putih dapat mencapai 60%, sedangkan masyarakat kulit hitam hanya menghasilkan 20% saja dari total pendapatan nasional.<sup>8</sup>

Pendapatan pemerintah propinsi-propinsi di Afrika Selatan pada tahun 1992-1993 sebesar 12,4% berasal dari pendapatannya sendiri dan 87,6% bersumber dari alokasi pemerintah pusat. Pemerintah pusat membiayai lebih dari 85% pengeluaran pemerintah propinsi di Afrika Selatan. Dari sisi ini, ekonomi Afrika Selatan di bawah rezim apartheid sangat sentralistik dan propinsi-propinsi secara ekonomi menjadi subordinasi dari pemerintah pusat.<sup>9</sup>

Para ahli ekonomi memperhitungkan bahwa bila perekonomian Afrika Selatan terus tumbuh pada tingkat pertumbuhan sejak tahun 1946-1975 maka GDP pada akhir tahun 80-an akan menjadi 45% lebih tinggi dari yang ada sekarang. Pada tahun 1988, South African Trust Bank menyatakan bahwa sanksi ekonomi sejak tahun 1985-1990 akan menimbulkan kerugian sebesar \$20 milyar dan bahwa Afrika Selatan setiap tahunnya menjadi lebih miskin 10% dibandingkan jika negara tersebut tidak terkena

... Hal tersebut mendorong meningkatnya angka pengangguran terutama di

kalangan kulit hitam dan tercatat sebanyak 40% dari angkatan kerja tidak memperoleh pekerjaan.

Perekonomian Afrika Selatan dibawah rezim apartheid dibangun di atas kekuatan ekonomi masyarakat kulit putih. Memang, ekonomi Afrika Selatan tumbuh secara dinamik selama dasawarsa 1950-an dan 1960-an. Pada dasawarsa 1970-an, kondisinya mengalami stagnasi dan penurunan sehingga kondisi ekonomi Afrika Selatan menjadi lebih kompleks setelah peningkatan pengangguran dan inflasi yang tinggi. Selama dasawarsa 1980-an walaupun tuntutan kelompok anti apartheid di dalam dan luar negeri untuk mengenakan sanksi ekonomi semakin kuat. Afrika Selatan tetap berhasil mempertahankan jaringan perdagangan luar negerinya terutama dengan sejumlah negara-negara barat.

Melihat hak-haknya dirampas oleh minoritas kulit putih, maka mayoritas kulit hitam seringkali mengadakan perlawanan-perlawanan menentang sistem politik apartheid yang membuat mereka tidak bisa banyak bicara dan tidak bisa berbuat apa apa di negeri mereka sendiri. Perjuangan warga kulit hitam yang hanya mengandalkan semangat saja tanpa disertai dengan taktik dan diplomasi yang baik hanya memperbanyak korban yang berjatuh. Sejalan dengan gerakan itu, orang-orang kulit hitam yang menerima pendidikan Barat mulai mengambil langkah-langkah untuk membentuk gerakan-gerakan politik. Maka berdirilah *South African National Congress* (SANC), yang kemudian mengubah namanya menjadi *African National Congress* (ANC) sebagai rekasi terhadap minoritas kulit putih yang

mendapatkan monopoli atas kekuasaan politik terhadap mayoritas kulit hitam

Pada tahun 1919-1920 ANC melancarkan kampanye dan mensponsori suatu demonstrasi, tetapi pemerintah mengambil tindakan-tindakan tegas yang membuat ANC kembali mengalami kegagalan dan akhirnya mengalami kemunduran yang drastis. Pada tahun 1955 kelompok-kelompok rasial yang menentang apartheid termasuk ANC, SAIC, *Coloured Peoples Political Organization* dan *White Congress of Democrats* mengadakan pertemuan di Kliptown (Johannesburg) dan menyusun *Freedom Charter*, yang menggariskan dasar-dasar bagi Afrika Selatan yang demokratis dan non rasial.<sup>10</sup> Sementara itu ANC kehilangan pemimpin-pemimpinnya dan pada tahun 1958 sejumlah anggotanya memisahkan diri dan mendirikan *Pan Africanist Congress* (PAC) di bawah pimpinan Robert Sobukwe.

Selain mendapat perlawanan dari internal warga kulit hitam, politik apartheid juga mendapat reaksi yang sangat keras dari dunia internasional. Reaksi tersebut datang dari negara-negara di benua Afrika maupun dari luar benua Afrika seperti Amerika, Inggris, Perancis, Masyarakat Ekonomi Eropa (EEC), dan British Commonwealth. Reaksi keras juga datang dari PBB sebagai organisasi internasional terbesar di dunia dan organisasi non pemerintah (NGO). Tekanan-tekanan tersebut dilakukan dengan cara boikot dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan perhubungan. Suatu "langkah bersama" juga diambil pada pertemuan antar menteri luar negeri negara-negara anggota EEC di Luksemburg pada tanggal 10 Oktober 1965. Pada pertemuan tersebut ditetapkan suatu kesamaan tindakan bagi semua

anggota EEC terhadap Afrika Selatan yang dapat dibagi menjadi dua yaitu tindakan restriktif dan tindakan positif.<sup>11</sup>

Ternyata sistem politik apartheid tidak pernah memberikan ketentraman terhadap seluruh warga negara Afrika Selatan. Hal ini tidak saja disebabkan oleh semakin meningkatnya perjuangan gerakan kelompok masyarakat kulit didalam negeri. Akan tetapi juga disebabkan oleh semakin efektifnya sanksi embargo ekonomi yang sudah dijatuhkan sejak 1950.<sup>12</sup> Negara-negara Afrika yang telah bertekad untuk melenyapkan politik apartheid juga semakin menekan mereka agar mematuhi resolusi-resolusi PBB yang dimaksud untuk mengucilkan Afrika Selatan dan memaksanya mengadakan perubahan-perubahan yang mendalam dalam politik rasialnya.<sup>13</sup>

Afrika Selatan dikenal sebagai negara yang kaya akan bahan-mineral untuk keperluan teknologi tinggi yang dibutuhkan oleh negara-negara besar seperti Amerika dan Uni Soviet selama Perang dingin, telah ikut dimanfaatkan oleh pemerintah Afrika Selatan untuk menghindari sanksi embargo ekonomi yang dijatuhkan oleh PBB. Sehingga dalam periode Perang Dingin itu Afrika Selatan berhasil membangun perekonomiannya. Dengan usainya Perang Dingin telah menyebabkan semakin menurunnya "Bargaining Positions" Afrika Selatan dalam politik dan ekonomi internasional. Akibatnya penurunan laju ekonomi berlanjut terus, perdagangan luar

---

<sup>11</sup> *World Conference on Sanction against Racist South Africa*, United Nations Centre against Apartheid, New York : Unesco House, 1987, hal. 97-98

<sup>12</sup> Syamsumar Dam, *op. cit.*, hal. 23

<sup>13</sup> Kirdi Dipudoyo, *op.cit.*, hal. 89

negeri mengalami penurunan akibat dari sanksi PBB yang mempersempit ruang gerak Afrika Selatan dalam melakukan kerjasama internasional.

Politik apartheid menyebabkan ketidakefisienan aktivitas ekonomi dan tatanan sosial ekonomi, kesejahteraan dan akses jasa publik menjadi tidak seimbang. Sehingga sebagian besar masyarakat kulit hitam terperangkap dalam kemiskinan struktural yang berkepanjangan. Tekanan Luar Negeri yang memberatkan perekonomian Afrika Selatan ternyata masih ditambah lagi dengan adanya kenyataan bahwa sistem ekonomi apartheid ternyata sudah tidak sesuai lagi diterapkan dalam perekonomian perdagangan bebas kapitalis. Ekonomi apartheid mempunyai banyak kelemahan yang kemudian justru membebani pemerintah Afrika Selatan.

Perubahan situasi politik dan ekonomi internasional, ternyata sangat berpengaruh terhadap situasi politik dan ekonomi dalam negeri Afrika Selatan. Untuk mengantisipasi perubahan itulah Frederick Willem de Klerk menawarkan kepada para pemilihnya dalam kampanye Partai Nasional tahun 1989, untuk mengakhiri politik apartheid demi kelangsungan hidup masyarakat kulit putih sendiri selanjutnya di Afrika Selatan.<sup>14</sup> Langkah ini diawali dengan pencabutan larangan kegiatan kelompok dan partai-partai politik serta pembebasan tokoh-tokoh pemimpinnya termasuk Nelson Mandela yang telah dipenjara selama 27 tahun.<sup>15</sup>

Kebijakan pemerintah F. W de Klerk mendapat perlawanan dari minoritas kulit putih yang merasa diuntungkan dan ingin mempertahankan apartheid. Maka

---

<sup>14</sup> Dam Syamsumar, *op.cit*, hal. 18

<sup>15</sup> P. J. J. B. van der Merwe, *Model of the PE*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hal. 7

diadakan referendum untuk menanyakan kesediaan warga kulit putih mengadakan perubahan di Afrika Selatan. Ternyata banyak warga kulit putih yang mendukung kebijakan tersebut. Dan akhirnya diputuskan untuk mengadakan pemilihan umum multi rasial pertama di Afrika Selatan pada tanggal 28 April 1994. Hasilnya dimenangkan oleh ANC dan terpilihlah Nelson Mandela sebagai pemimpin baru di Afrika Selatan.

Melalui pemerintahan demokratis, Nelson Mandela membawa perubahan politik yang tajam di Afrika Selatan. Melalui program Rekonsiliasi Nasional sebagai langkah awal dimana dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (TRC). Konstitusi apartheid yang bersifat diskriminatif diganti dengan konstitusi baru yang lebih demokratis. Konstitusi ini telah menjamin kehidupan masyarakat yang multi ras di Afrika Selatan. Hal tersebut tentunya berpengaruh terhadap perubahan kebijakan berbagai bidang terutama dalam bidang ekonomi.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas maka dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut: "Dampak kebijakan ekonomi Afrika Selatan pasca apartheid

#### D. Kerangka Dasar Teori

Teori adalah bentuk penjelasan paling umum yang memberitahukan mengapa sesuatu bisa terjadi dan kapan sesuatu bisa diduga akan terjadi. Penggunaan teori selain untuk melakukan eksplanasi juga menjadi dasar bagi sebuah prediksi. Untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di Afrika Selatan, penulis akan menggunakan dasar teori sebagai acuan. Kerangka dasar teori ini dipakai sebagai pedoman untuk mempermudah kegiatan penelitian dan alur pemikiran, sehingga akan dicapai hasil yang runtut dan tepat.

Berdasarkan rumusan masalah dalam penulisan ini, maka landasan teori yang akan dipakai penulis adalah *Teori Sistem menurut David Easton, Teori Ekonomi Politik dan Konsep Kepentingan Nasional*, sebab pembahasan dalam penelitian ini tentang sistem politik suatu negara dan pengaruhnya terhadap lingkungan dan berbagai aspek dimana sistem itu berada.

Pengertian mengenai teori sistem itu sendiri adalah :

*as a series of statement about relationship among independent and dependent variable in which change in one or more variable are accompanied, or combination of variable followed by change in other variable of combination variable.*<sup>16</sup>

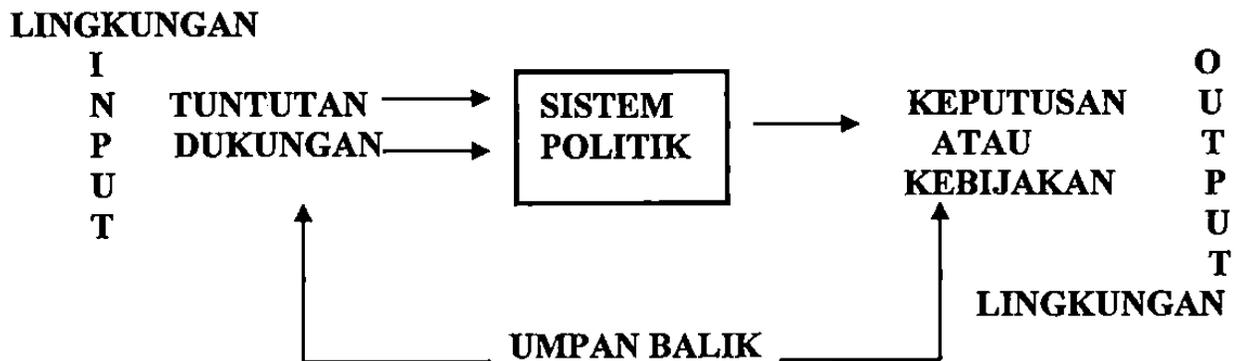
Jadi teori sistem ini adalah serangkaian variable yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi antara variable yang satu dengan variable yang lainnya, begitu pula sistem politik yang ada pada suatu negara.

---

<sup>16</sup> James E. Dougherty dan Robert L. P, Jr. sebagaimana dikutip oleh Harwanto Dahlan, *Military*

Teori ini mempelajari bagaimana keputusan-keputusan yang otoritatif atau sah dibuat oleh pemerintah suatu negara dan dilaksanakan dalam suatu masyarakat. Dan yang menjamin terus bekerjanya sistem itu adalah berbagai macam input. Input-input ini diubah oleh proses-proses yang terjadi dalam sistem itu menjadi output. Dan selanjutnya output-output ini menimbulkan pengaruh terhadap sistem itu sendiri maupun terhadap lingkungan dimana sistem itu berada. Rumusan ini sederhana tetapi juga cukup memadai untuk menjelaskan berbagai hal. Hubungan ini secara diagram dapat dilihat dalam gambar berikut.<sup>17</sup>

**Diagram 1. Teori Sistem (David Easton)**



Sumber: Dikutip dari Mohtar Mas'oe'd dan Colin Mac Andrew, *Perbandingan Sistem Politik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1997.

Dalam menganalisa perubahan sistem politik pasca apartheid serta pengaruhnya terhadap perkembangan ekonomi di Afrika Selatan, penulis akan menggunakan teori sistem milik David Easton. Sehingga dapat dijelaskan sebagai berikut :

## 1. Input :

Ada dua jenis pokok input dalam suatu sistem politik, yaitu tuntutan dan dukungan. Dalam kasus ini input yang berupa tuntutan yang datang dari dalam negeri dan dukungan terhadap tuntutan tersebut dari dunia internasional. Input-input tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Pertama*, tuntutan yang datang dari dalam negeri sendiri yaitu perjuangan mayoritas warga kulit hitam yang menginginkan dihapuskannya sistem politik apartheid, agar antara warga kulit hitam dan kulit putih mempunyai hak yang sama dalam segala bidang. Karena selama apartheid terdapat pembatasan akses publik bagi warga kulit hitam.

Keinginan untuk adanya kebijakan ekonomi yang berorientasi kepada pemerataan kesempatan dan pendapatan terhadap semua lapisan masyarakat. Karena selama ini warga kulit putih sangat dominan terhadap penguasaan sumber-sumber perekonomian.<sup>18</sup>

Perjuangan tersebut terutama dilakukan oleh ANC dan PAC sebagai partai politik terbesar yang beranggotakan warga kulit hitam di Afrika Selatan, namun sepertinya perjuangan tersebut kurang mendapatkan hasil yang maksimal. Dan tuntutan tersebut dipengaruhi oleh keadaan lingkungan domestik Afrika Selatan.

*Kedua*, dukungan yang datang dari dunia internasional terhadap tuntutan warga kulit hitam. Dukungan tersebut diwujudkan dengan melakukan tekanan-tekanan oleh beberapa negara terhadap pemerintahan Afrika Selatan dibawah rezim apartheid

Negara-negara tersebut antara lain Amerika, Perancis, Masyarakat Ekonomi Eropa, British Commonwealth maupun negara-negara di benua Afrika. Belum lagi ditetapkannya resolusi PBB berupa embargo ekonomi serta tekanan yang dilakukan perusahaan transnasional berupa pengurangan frekuensi perdagangan ke Afrika Selatan. Hal tersebut memaksa rezim apartheid menguras surplus cadangan devisanya untuk menutup pembayaran hutang luar negrinya. Sepertinya tekanan-tekanan yang datang dari dunia internasional sangatlah efektif untuk menghentikan sistem politik apartheid yang sangat rasialis dan melanggar hak asasi manusia.

## 2. Sistem Politik atau Proses Politik :

Sistem politik atau proses politik merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pemerintahan terhadap input-input yang dijadikan sebagai acuan atau dasar dalam menentukan output yang berupa keputusan atau kebijakan. Dalam hal ini proses politik yang terjadi di Afrika Selatan tentunya sangatlah jelas dengan melihat berbagai input yang berupa tuntutan masyarakat Afrika Selatan sendiri maupun dukungan dari masyarakat maupun organisasi internasional. Keinginan untuk lepas dari belenggu rezim apartheid sangatlah kuat, proses yang dilakukan oleh pemerintahan F W de Klerk, sangatlah menentukan output yang berupa kebijakan. Dan kebijakan tersebut akan diterapkan pada masyarakat Afrika Selatan.

## 3. Output :

Output merupakan hasil dari pada input yang masuk dalam suatu proses politik. Sistem politik tersebut mempunyai konsekuensi penting bagi masyarakat,

itu adalah... yang dinikmati hasil. Jika kita menilai bahwa sistem

politik tidak mempunyai output yang penting bagi masyarakat, barangkali kita tidak akan tertarik akan hasil.<sup>19</sup> Setelah pemerintahan de Klerk memperoleh input-input yang berupa tuntutan maupun dukungan dan setelah melalui proses politik yang cukup panjang, maka pemerintahan ini kemudian mengeluarkan kebijakan berupa penghapusan sistem politik apartheid. Dan mengubahnya menjadi sistem politik yang lebih demokratis dengan pemerintahan serta kebijakan baru yang merupakan hasil dari proses politik tersebut.

Kebijakan yang membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan di Afrika Selatan tersebut diterapkan kepada seluruh masyarakat. Ada keterkaitan variable yang satu dengan yang lain yaitu input maupun output sering disebut sebagai umpan balik. Sehingga kebijakan tersebut akan berpengaruh dan dipengaruhi oleh tuntutan dukungan dari lingkungan domestik ataupun lingkungan internasional begitupun sebaliknya.

Perluasan atau kemunduran demokrasi mempunyai implikasi terhadap nilai-nilai sosial lainnya, seperti pertumbuhan ekonomi, persamaan sosio ekonomi, stabilitas politik, keadilan sosial dan kemerdekaan nasional. Dalam masyarakat suatu pembangunan, kemajuan kearah satu atau beberapa tujuan ini dapat selaras dengan suatu tingkat demokrasi yang tinggi. Pada tingkat pembangunan sosial ekonomi lainnya, dapat terjadi konflik. Masalah tepat tidaknya demokrasi bagi negara-negara miskin dalam konteks ini adalah suatu hal yang sentral. Tetapi bahkan masyarakat maju pun hanya dapat mencapai demokrasi dengan mengorbankan beberapa nilai

---

<sup>19</sup> Mohtar Mas'ood dan Colin Mac Andrew, *op.cit.*, hal. 37

penting lainnya seperti keamanan nasional.<sup>20</sup> Untuk lebih menguraikan korelasi politik dan ekonomi maka penulis akan menggunakan Teori Ekonomi Politik.

*Ekonomi politik* menurut Martin Stainland adalah sebuah studi tentang teori sosial dan keterbelakangan, mengacu pada masalah dasar dalam teori sosial yaitu hubungan antara politik dan ekonomi. Sedangkan menurut Caporaso dan Levine, ekonomi politik dimaksudkan untuk memberikan sarana mengenai pengelolaan masalah-masalah ekonomi pada para penyelenggara negara. Ekonomi politik dapat juga didefinisikan sebagai analisis ekonomi terhadap proses politik dimana kajian ini mempelajari institusi politik sebagai entitas yang bersinggungan dengan pengambilan keputusan ekonomi politik yang berusaha mempengaruhi pengambilan keputusan dan pilihan publik, baik untuk kepentingan kelompok atau kepentingan masyarakat luas.<sup>21</sup>

Pemerintah minoritas kulit putih di Afrika Selatan menjadikan apartheid sebagai kebijakan resmi pemerintah. Apartheid menjadi politik resmi Afrika Selatan sejak tahun 1948 setelah Partai Nasional memegang kekuasaan atas pemerintah. Politik apartheid yang sangat diskriminatif menyebabkan kelompok masyarakat kulit putih yang merupakan kelompok minoritas, pada satu pihak memberikan kontribusi yang sangat dominan dalam struktur ekonomi dan politik Afrika Selatan. Dibandingkan masyarakat kulit hitam yang merupakan kelompok mayoritas di lain pihak memiliki kontribusi yang sangat minimal. Kelompok minoritas kulit putih menguasai sektor swasta penting dan modern, sedangkan kelompok mayoritas kulit

---

<sup>20</sup> Samuel P. Huntington, "Will More Countries Become Democratic?" *Political Science Quarterly* 99, hal. 193-218.

hitam hanya mendominasi sektor informal dan tradisional serta bekerja untuk masyarakat kulit putih sebagai buruh.

Peran negara hanya sebagai sarana memperjuangkan kepentingan kelas dan hanya menguntungkan kaum kapitalis atau minoritas swasta. Kelas sosial sebagai aktor dominan dalam ekonomi politik dan bertindak berdasar kepentingan materiil untuk kemakmuran ekonomi kelasnya. Hal tersebut menyebabkan perbedaan ekstrim antara kekayaan untuk kaum kapitalis dan kemiskinan untuk kaum buruh.<sup>22</sup>

Secara nasional, pendapatan perkapita Afrika Selatan pada tahun 1990 mencapai 2.530 dolar AS. Pendapatan perkapita sebesar itu termasuk sangat menakjubkan di lingkungan negara-negara berkembang. Akan tetapi, angka tersebut merupakan pendapatan per kapita sebagian kecil masyarakat kulit putih, sedangkan masyarakat mayoritas kulit hitam terperangkap dalam kemiskinan struktural yang berkepanjangan. Akibatnya, Afrika Selatan dikenal sebagai negara yang distribusi pendapatan dan distribusi kepemilikan tanahnya paling tidak seimbang di dunia.<sup>23</sup>

Berkembangnya Liberalisme dan semakin mengglobalnya perekonomian telah menyebabkan peran negara semakin surut dan digantikan oleh individu-individu swasta. Bahkan dapat dikaitkan peran negara dan masyarakat hanya sebagai instrumen yang diperlukan untuk menjamin terjadinya proses akumulasi kekayaan oleh anggota-anggota masyarakat, terutama perusahaan transnasional atau Multinational Corporations. Seperti menjamin keamanan, kepastian hukum,

melindungi hak milik, mencegah monopoli pasar, menyelenggarakan pendidikan dan membangun infrastruktur. Negara jangan terlalu mengintervensi pasar agar tercipta ekonomi pasar bebas untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Setiap negara harus bersikap terbuka dan kooperatif dalam hubungan ekonominya dengan negara lain untuk menjamin keberlangsungan ekonomi domestik.<sup>24</sup>

Tekanan luar negeri yang memberatkan perekonomian Afrika Selatan ternyata masih ditambah lagi dengan adanya kenyataan bahwa sistem ekonomi apartheid ternyata sudah tidak sesuai lagi diterapkan dalam perekonomian perdagangan bebas kapitalis. Ekonomi apartheid mempunyai banyak kelemahan yang kemudian justru membebani pemerintah Afrika Selatan. Dua pilihan segera menanti F W de Klerk, yaitu antara tetap mempertahankan apartheid yang berarti akan memperkuat permusuhan antar ras, atau mulai menghapus dan menggantikannya dengan reformasi demokratis dan membagi kekuasaan dengan ras lainnya. Tekanan domestik dan internasional yang semakin menguat kemudian mendorong de Klerk mengambil keputusan untuk segera melaksanakan reformasi terhadap apartheid.<sup>25</sup>

Dalam hal ini penulis juga akan membahas tentang kepentingan nasional Afrika Selatan, terkait dengan kebijakan ekonominya pasca apartheid guna membangun perekonomian dalam negeri yang didukung dengan kebijakan keluar dan merupakan proses dari perwujudan kepentingan nasional itu sendiri.

---

<sup>24</sup> Mohtar Mas' oed, *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, 1994, hal. 22

<sup>25</sup> *Progress Made in the Implementation of the Declaration on Apartheid and Its Destructive*

Keuntungan nasional yang terkait dengan Politik Luar Negeri dideskripsikan sebagai berikut oleh Jack C. Plano dan Roy Olton, Politik Luar Negeri sebagai strategi atau bagian yang terencana dari tindakan yang dihasilkan oleh pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional bertujuan mencapai keuntungan nasional.

*(Foreign Policy a strategy or planed course of action develop by decision makers of a state vis avis other or international entities aimed at achieving specific goals in term of national interest)<sup>26</sup>*

Perwujudan dari keuntungan nasional melalui politik luar negeri dapat dicapai dengan memperhatikan kekuatan nasional yang dimiliki oleh suatu negara. Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton elemen-elemen keuntungan nasional tersebut adalah : kelangsungan hidup (*self preservation*), kemandirian hidup (*independence*), integritas teritorial (*territorial integrity*), keamanan militer (*military security*), dan kemakmuran ekonomi (*economic wellbeing*).

Sedangkan menurut Chareles W. Kegley dan Eugene R. Wittkopf, keuntungan nasional adalah tujuan-tujuan yang dikejar negara untuk memaksimalkan apa yang terbaik untuk negaranya secara mandiri.<sup>27</sup> Keuntungan nasional berkaitan dengan geopolitik, kemampuan militer, dan ekonomi. Geopolitik merupakan letak geografis dan konsekuensi-konsekuensinya untuk negara dalam pencapaian

---

<sup>26</sup> Jack C. Plano and Roy Olton, *The International Dictionary*, Holt, Rineheart & Winston, USA, 1967, hal 127.

<sup>27</sup> Chareles W. Keglev with Eugene R. Wittkopf, *World Politics: Trends and Transformation, Tenth*

kepentingan nasional. Kemampuan militer akan mendukung bagaimana negara mencapai tujuan-tujuannya. Ketika semua negara ingin memperoleh tujuan yang sama, kemampuan untuk merealisasikan tujuan negara akan bervariasi mengikuti kemampuan negara tersebut. Keadaan ekonomi dipengaruhi oleh level ekonomi dan pembangunan industri suatu negara yang akan mempengaruhi tujuan politik luar negeri.

Afrika Selatan merupakan negara industri dengan potensi alam yang besar terutama cadangan mineral dan emas. Namun demikian Afrika Selatan hanya mampu memproduksi sebagian kecil kebutuhan industri dasar. Sedangkan pemenuhan kebutuhan produk teknologi tinggi dipenuhi dari luar negeri. Karena itu pengelolaan sumber daya alam Afrika Selatan masih dijalankan oleh pihak asing melalui perusahaan-perusahaan yang beroperasi disana.

Adapun keputusan Afrika Selatan tetap mempertahankan momentum ekonomi masyarakat kulit putih serta membuat orientasi kebijakan keluar dengan beberapa negara. Hal tersebut merupakan salah satu kepentingan nasional untuk mencapai kemakmuran ekonomi (*economic wellbeing*) sehingga nantinya juga berpengaruh terhadap tujuan politik luar negeri serta posisi Afrika Selatan sendiri di dunia internasional.

Secara demografik penduduk Afrika Selatan sangat multi ras karena mereka terdiri dari ras Afrika (kulit hitam), ras Eropa (kulit putih), ras Asia dan ras kulit berwarna. Walaupun ras Eropa hanya 12% dari jumlah penduduk Afrika Selatan

memiliki jaringan yang luas dengan beberapa negara Barat termasuk juga dalam perdagangan luar negeri Afrika Selatan. Untuk itu, perlu dibuat sebuah kebijakan yang mengarah pada ekonomi internasional dengan Negara lain untuk mendukung kebijakan ekonomi domestik.

#### **E. Hipotesa**

Perubahan politik yang terjadi di Afrika Selatan yang lebih demokratis tentunya disertai dengan perubahan kebijakan termasuk juga dalam bidang ekonomi. Perwujudan dari adanya perubahan yaitu dengan adanya kebijakan-kebijakan baru yang menentukan perkembangan ekonomi Afrika Selatan. Kebijakan tersebut antara lain :

1. Ke dalam :

- a) Program Pembangunan Ekonomi (RDP)
- b) Kebijakan ekonomi makro

2. Ke Luar :

- a) Peningkatan perdagangan luar negeri
- b) Program amnesti pajak untuk memaksimalkan insentif pajak Afrika Selatan
- c) Kerjasama ekonomi dengan Negara-negara kawasan maupun

## **F. Jangkauan Penelitian**

Dari segi materi pembahasan, penulis menekankan pembahasan pada perkembangan ekonomi Afrika Selatan. Dimulai dari dihapusnya sistem politik apartheid di Afrika Selatan dan adanya pemerintahan baru yang dipimpin oleh Nelson Mandela pada tahun 1994 hingga pada berakhirnya masa pemerintahan Nelson Mandela pada tahun 1999. Namun pembahasan tersebut tidak bersifat kaku dan dapat berkembang sejauh data tersebut dapat mendukung dalam penulisan karya ilmiah tersebut.

## **G. Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini didasarkan pada metode studi pustaka (*library research*), metode ini dilakukan karena semua sumber-sumber yang digunakan sebagai acuan bersumber dari literature yang ada di perpustakaan yang merupakan data sekunder. Literature kepustakaan ini terdiri dari buku-buku, jurnal, majalah, surat kabar, laporan-laporan, serta tulisan-tulisan yang secara ilmiah layak untuk dijadikan literature. Data-data dari literature tersebut diakumulasikan dan disusun secara sistematis sesuai dengan kerangka penulisan

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penyusunan karya tulis ini maka perlu adanya penyusunan yang sistematis dalam beberapa bab :

**BAB I** Pendahuluan berisi tentang Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penelitian, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Dasar Teori, Hipotesa, Jangkauan Penelitian, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II** Afrika Selatan Masa Apartheid (1948-1990) akan berisi tentang sejarah politik apartheid dan kondisi ekonomi masa apartheid.

**BAB III** Transisi Sistem Politik Afrika Selatan (1990-1994) akan berisi tentang perjuangan masyarakat kulit hitam, sanksi dan tekanan dari dunia internasional, serta perubahan sistem politik Afrika Selatan.

**BAB IV** Perekonomian Afrika Selatan Pasca Apartheid (1994-1999) akan berisi tentang Kebijakan Ekonomi Dibawah Pemerintahan Nelson Mandela dan dampak kebijakan tersebut bagi pertumbuhan ekonomi Afrika Selatan.

**BAB V** bab ini merupakan bab penutup berisi kesimpulan yang ditarik dari pembahasan permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya